

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia.¹ Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan² yang aman, bermutu dan terjangkau¹ tidak hanya bagi masyarakat dengan ekonomi yang mencukupi, namun seluruh lapisan masyarakat di Indonesia termasuk fakir miskin dan anak-anak terlantar.³ Untuk mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, negara membuat sebuah sistem yang dapat memantau dan mengontrol berjalannya pelayanan kesehatan yang ada di seluruh Indonesia yaitu Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2004.⁴

Selain jaminan sosial, pemerintah juga bertanggung jawab atas pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai upaya mewujudkan komitmen global sesuai amanat *World Health Assembly (WHA)* / Majelis Kesehatan Dunia untuk mengembangkan *Universal Health Coverage (UHC)* / Cakupan Kesehatan secara menyeluruh bagi seluruh penduduk Indonesia pada 1 Januari 2019⁵ sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan kesehatan bagi yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.⁶

Upaya pemerintah dalam menyelenggarakan jaminan sosial dan jaminan kesehatan yaitu membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) pada 1 Januari 2014 berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2011.⁷ Peserta BPJS kesehatan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan secara menyeluruh⁸ yang terdiri dari pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, pelayanan persalinan, pelayanan gawat darurat, dan pelayanan ambulan⁹ yang berkualitas dan berkeadilan¹⁰

Fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan per 31 Desember 2016 yaitu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebanyak 20.710 terdiri dari 9.813 Puskesmas, 4.578 Dokter Praktek Perorangan (DPP), 1.550 Dokter Gigi Praktek Perorangan (DGPP), 3.880 Klinik Pratama, 704 Klinik TNI, 568 Klinik POLRI, dan 17 Rumah Sakit Tipe D Pratama. FKTP tertinggi ada di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 2.749 dan terendah di Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 104 FKTP. Sedangkan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) sebanyak 2.069 terdiri dari 876 Rumah Sakit Swasta, 667 Rumah Sakit Pemerintah, 196 Rumah Sakit Khusus, 150 Klinik Utama, 145 Rumah Sakit TNI/POLRI dan 35 Rumah Sakit Khusus Jiwa. Jumlah FKRTL tertinggi ada di Provinsi Jawa Barat sebanyak 283 dan terendah di Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 7 FKRTL.⁵

Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2016 sebanyak 258.705.000 jiwa.¹¹ Cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2016 sejumlah 171.939.254 jiwa (66,46%), dan 86.765.746 jiwa (33,54%) yang belum menjadi peserta jaminan kesehatan.⁵ Data lain diperoleh dari BPJS Kesehatan per 31 Desember 2017 menunjukkan jumlah peserta BPJS Kesehatan sebesar 187.982.949 atau 72,66% dari 258.000.000 jumlah penduduk Indonesia.¹² Berdasarkan data Rapat Kerja Kesehatan Nasional (RAKERKESNAS) pemanfaatan layanan BPJS Kesehatan pada tahun 2016 secara keseluruhan yaitu sebesar 192.900.000 meliputi pemanfaatan FKTP sebesar 134.900.000, Poliklinik Rawat Jalan Rumah Sakit sebesar 50.400.000 dan Rawat Inap Rumah Sakit sebesar 7.600.000.¹³

Jumlah peserta BPJS Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sebesar 73,94% meliputi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 41,90%, PBI dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tingkat Provinsi (APBD1) sebesar 0,49%, PBI dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tingkat Kota / Kabupaten (APBD2) sebesar 1,05%, Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) (18%), dan Non BPJS (30,50%)¹⁴ dari jumlah penduduk 34.250.000

jiwa.¹⁵ Pemanfaatan layanan BPJS Kesehatan dari Balai Kesehatan Masyarakat (BALKESMAS) sebanyak 19.157 kunjungan, sedangkan dari Balai Kesehatan Indera Masyarakat (BKIM) Provinsi Jawa Tengah sebanyak 15.375 kunjungan.¹⁴

Desa Wangandawa merupakan desa dengan wilayah terluas sebesar 1,98 km² dari 19 desa yang berada di Kecamatan Talang dan termasuk wilayah kerja Puskesmas Kaladawa.¹⁶ Jumlah penduduk Desa Wangandawa yaitu 6.690 orang yang terdiri dari 3.373 laki-laki dan 3.317 perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 1.834.¹⁷

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di Puskesmas Kaladawa selama tahun 2017, diperoleh data peserta BPJS Kesehatan PBI maupun non PBI Desa Wangandawa sebanyak 750 Kepala Keluarga (KK) yang telah terdaftar. Desa Wangandawa merupakan desa dengan kunjungan layanan BPJS Kesehatan terendah sebanyak 706 kunjungan meliputi layanan Balai Pengobatan (BP) dan laboratorium sebanyak 459 kunjungan, Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang meliputi KB dan Imunisasi sebanyak 69 kunjungan dan rujukan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) sebanyak 178 kunjungan dari peserta BPJS PBI dan non PBI. Sedangkan Desa Bengele merupakan Desa dengan kunjungan tertinggi layanan BPJS Kesehatan sebanyak 2.579 kunjungan meliputi layanan BP dan laboratorium sebanyak 1.671 kunjungan, layanan KIA sebanyak 445 kunjungan dan rujukan ke FKTL sebanyak 463 kunjungan dari peserta BPJS PBI maupun non PBI.

Beberapa hal di atas membuat peneliti tertarik untuk menggali sejauh mana persepsi peserta dan dukungan keluarga dengan pemanfaatan layanan BPJS Kesehatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam proposal penelitian ini adalah “Apakah ada Hubungan Persepsi Peserta dan Dukungan Keluarga dengan Pemanfaatan Layanan BPJS Kesehatan?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui hubungan persepsi peserta dan dukungan keluarga dengan pemanfaatan layanan BPJS Kesehatan.

2. Tujuan Khusus

- a. Mendeskripsikan persepsi peserta tentang pemanfaatan layanan BPJS Kesehatan.
- b. Mendeskripsikan dukungan keluarga tentang pemanfaatan layanan BPJS Kesehatan.
- c. Mendeskripsikan pemanfaatan layanan BPJS Kesehatan.
- d. Menganalisis hubungan persepsi peserta dengan pemanfaatan layanan BPJS Kesehatan.
- e. Menganalisis hubungan dukungan keluarga dengan pemanfaatan layanan BPJS Kesehatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang persepsi peserta dan dukungan keluarga dalam pemanfaatan layanan BPJS Kesehatan.

2. Manfaat Teoritis dan Metodologis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumber atau referensi bagi pemegang kebijakan agar penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan layanan BPJS Kesehatan lebih merata.

E. Keaslian Penelitian

Tabel 1.1 Daftar publikasi yang menjadi rujukan

No	Peneliti (th)	Judul	Jenis Penelitian	Variabel bebas dan terikat	Hasil
1	Toni Adi Pratama (2014) ¹⁸	Hubungan Tingkat Pendidikan, Pengetahuan, dan Dukungan Suami dengan Pemanfaatan BPJS pada Ibu Partum di Wilayah Kerja Puskesmas Karanglewas Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas	<i>Survei Analitik Cross Sectional</i>	- Tingkat Pendidikan - Pengetahuan - Dukungan Suami - Pemanfaatan BPJS	Ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan, pengetahuan dan dukungan suami dengan pemanfaatan BPJS pada Ibu Post Partum.
2	Bayu Kusuma Wardana (2016) ¹⁹	Hubungan Pendidikan dan Pengetahuan Peserta BPJS di Kelurahan Rowosari dengan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Rowosari	<i>Analitik Cross Sectional</i>	- Pendidikan - Pengetahuan - Pemanfaatan pelayanan kesehatan	Ada hubungan antara pendidikan dan pengetahuan peserta BPJS dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan di Puskesmas
3	Apriyanda Kusuma Wijaya (2016) ²⁰	Hubungan Pemahaman tentang Kewajiban Peserta BPJS Kesehatan dengan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan di Desa Tanjung Harapan Seputih Banyak Lampung Tengah	<i>Deskriptif Kuantitatif</i>	- Pemahaman - Kewajiban peserta BPJS Kesehatan - Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan	Ada hubungan pemahaman tentang kewajiban peserta BPJS Kesehatan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan
4	Angelia Primanisa (2017) ²¹	Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pemanfaatan Puskesmas sebagai Pelayanan Kesehatan oleh Peserta BPJS Kesehatan Non PBI di Wilayah Kerja Puskesmas Bungus Padang Tahun 2017	<i>Kuantitatif Cross Sectional</i>	- Faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan Puskesmas	Faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan Puskesmas sebagai pelayanan kesehatan adalah pengetahuan, keyakinan dan kepercayaan.

Penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada lokasi penelitian, waktu penelitian, dan variabel bebas yaitu persepsi peserta dan dukungan keluarga serta variabel terikat yaitu pemanfaatan layanan BPJS Kesehatan.

